

TINJAUAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL PROYEK THAMRIN NINE TAHAP KONSTRUKSI

Latifah Hanif, Vinka Alviana Susanti, Budi Damianto

*Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok, Kukusan,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424.*

e-mail : latifaahaanif@gmail.com , vinkaalviana@gmail.com , budi.damianto@yahoo.com

ABSTRACT

Thamrin Nine project is located at 9 M.H Thamrin Street, Central Jakarta. This construction has building area of 350.168 m² with 69 floors and 6 basements. In accordance of Minister of Environment Regulation No.5 of 2012, Thamrin Nine Project includes project that must have Environmental Impact Analysis. As stated in the regulation, the type of business / activity in the field of building construction which is obliged to have an Environmental Impact Analysis is that has a building area of more than 10,000 m². The purpose of this Final Project are to analyze about implemented or not implemented the form of Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan on document AMDAL, conformity or nonconformity of implementation of Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan, and found the solution from the problem in that implementation of Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan. The Final Project writing methods were literature study, collected data, survey, conformity analysis, found the problem and the solution, then made the conclusion. The result analysis said that mostly Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan document already implemented. The conformity of implementation of Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan in general it can said to be appropriate.

Keywords : RKL; RPL; Review; Implementation; Thamrin Nine Project Central Jakarta

ABSTRAK

Proyek Thamrin Nine berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No.9 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Proyek ini memiliki luas seluruh bangunan 350.168 m² dengan ketinggian bangunan mencapai 69 lantai ditambah dengan 6 lantai basement. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012, Proyek Thamrin Nine termasuk proyek yang berkewajiban memiliki AMDAL. Sebagaimana disebutkan pada peraturan tersebut bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan dalam bidang pembangunan gedung berkewajiban memiliki AMDAL adalah memiliki luas bangunan lebih dari 10.000 m². Tujuan dibuat Proyek Akhir ini adalah untuk melakukan evaluasi apakah bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam dokumen RKL dan RPL dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, pelaksanaannya sesuai atau tidak sesuai, serta menemukan solusi dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RKL dan RPL tersebut. Metode penulisan Proyek Akhir ini adalah melakukan studi literatur, pengumpulan data, survei lapangan, menganalisis kesesuaian, menemukan permasalahan dan kendala beserta solusinya, lalu menarik kesimpulan. Dari hasil analisis sebagai besar dokumen RKL dan RPL telah dilaksanakan. Kesesuaian pelaksanaan dokumen RKL dan RPL secara umum dapat dikatakan sesuai.

Kata Kunci : RKL; RPL; Thamrin Nine Jakarta Pusat.

PENDAHULUAN

Pengertian Lingkungan Hidup dalam Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Agar lingkungan tetap terpelihara keberadaan dan kemampuannya, maka aktivitas pembangunan harus dilandasi pelestarian lingkungan. Sehingga diperlukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai sarana untuk mengetahui adanya dampak dari suatu pembangunan secara dini, salah satunya dengan mengkaji dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Pembangunan akan menimbulkan dampak negatif diantaranya terganggunya penduduk sekitar proyek akibat dari penurunan kualitas udara, kebisingan, peningkatan air larian, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas tanah akibat kegiatan pembangunan proyek, dan lain-lain.

(Wardhana, 2004) Pencemaran udara diartikan adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi udara dari susunan atau keadaan normalnya. Menurut (WHS, 1993) Kebisingan adalah bunyi atau suara yang

tidak dikehendaki yang bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan dapat menurunkan daya dengar seseorang. Sedangkan air larian atau biasa disebut dengan limpasan adalah apabila intensitas air hujan yang jatuh di suatu DAS melebihi kapasitas infiltrasi, setelah laju infiltrasi terpenuhi air akan mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah.

Menurut (Suratmo, 1993) Perubahan kualitas dan kuantitas air dapat terjadi karena adanya buangan bahan organik dan anorganik ke dalam air, yang dapat larut dalam air maupun yang tidak dan terjadinya perubahan dalam kekuatan aliran dan siklus tata air di alam. Todd (1989) menjelaskan bahwa penyebaran sumber pencemaran air tanah tergantung pada geologi tempat, aliran air tanah, jenis dan kepekaan pencemaran, keterusan pembuangan limbah dan sebaran pengubah sesuai yang dilakukan terhadap sistem air tanah.

Dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan proyek tersebut, maka diadakannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis). Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2019 – Juni 2019. Bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dokumen ANDAL, dokumen RKL – RPL proyek serta data – data hasil pengujian parameter lingkungan. Metode analisa data penulisan dengan mempelajari dokumen RKL – RPL serta melakukan peninjauan langsung di lapangan yaitu dengan

melakukan interview dengan HSE Proyek dan warga sekitar proyek. Hasil penulisan berupa tinjauan terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian antara dokumen RKL – RPL terhadap pelaksanaannya di lapangan serta menjelaskan permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat.

HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan Studi AMDAL yang telah dilakukan dampak dari kegiatan pembangunan Proyek Thamrin Nine meliputi Penurunan Kualitas Udara, Peningkatan Kebisingan, Peningkatan Kuantitas Air Permukaan, Penurunan Kualitas Air Permukaan, Penurunan Kuantitas Air Tanah, dan Peningkatan Kesempatan Kerja dan berusaha.

Bentuk pengelolaan yang dilakukan untuk meminimalisir penurunan kualitas udara adalah: Menggunakan kendaraan laik operasi, memcuci rodan truk, menyiram badan jalan dengan air, menyimpan semen pada silo, memasang jaring pengaman di sekeliling bangunan, menanam pohon di area sekitar proyek. Berdasarkan peninjauan di lokasi studi menggunakan kendaraan laik operasi dibuktikan dengan adanya kartu uji berkala yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui emisi gas yang dihasilkan. Pekerja juga rutin melakukan pencucian roda truk agar material yang terbawa pada roda setelah mengangkut material tidak mengotori badan jalan. Penyiraman badan jalan pada lokasi proyek dilaksanakan untuk mengurangi penyebaran debu ataupun membersihkan ceceran material bangunan agar tidak mengotori lingkungan. Pada Proyek Thamrin Nine, material semen diletakkan di tempat yang tertutup yang terletak pada *batching plant*. Untuk mencegah debu dan jatuhnya puing, dipasang jaring penutup dan pengaman (*safety net*) pada sekeliling bangunan kegiatan konstruksi bagian atas. Pihak pemrakarsa juga melakukan penanaman pohon guna

menyerap terdispersinya gas atau debu pada lokasi proyek. Sedangkan bentuk pemantauan terhadap penurunan kualitas udara dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel dan menganalisa di laboratorium.

Untuk meminimalisir terjadinya peningkatan kebisingan dilakukan: Menggunakan peralatan laik operasi, meminimalisir penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan, melakukan kegiatan konstruksi yang menimbulkan bising hanya sampai pukul 22.00, dan menempatkan genset pada ruang kedap suara. Penggunaan kendaraan laik operasi dibuktikan dengan adanya kartu uji berkala yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dan melakukan pengecekan kendaraan yang akan digunakan. Untuk meminimalisir suara yang ditimbulkan akibat penggunaan alat berat, kontraktor telah memasang *sound barrier* setinggi 3 m, pemasangan ini dilakukan agar suara yang keluar tidak mengganggu masyarakat disekitar proyek. Kegiatan pengecoran sering kali dilakukan melebihi pukul 22.00 dan memberikan dampak bising yang cukup besar, pihak kontraktor seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya kegiatan pengecoran, namun pihak kontraktor seringkali tidak berkoordinasi dengan masyarakat mengenai kegiatan pengecoran yang dilakukan melebihi pukul 22.00. Pada Proyek Thamrin Nine, genset yang digunakan memiliki peredam suara tersendiri yakni rumah genset, genset diletakkan pada rumah genset tersebut agar tidak mengganggu para pekerja maupun masyarakat sekitar. Sedangkan bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran dilokasi dan membandingkan hasilnya dengan baku mutu lingkungan.

Bentuk pengelolaan untuk mengurangi peningkatan kuantitas air

permukaan adalah melakukan kegiatan pembersihan saluran drainase, membangun saluran drainase mikro yang diintegrasikan dengan saluran drainase makro, melakukan koordinasi dengan instalasi terkait terkait dengan pengoperasian sumur *dewatering*. Kegiatan pembersihan saluran biasanya dilakukan pada sore hari menjelang pekerjaan selesai. Saluran drainase pada proyek ini terbebas dari sampah dan lumpur dapat dibuktikan dengan adanya ikan – ikan pada saluran proyek ini. Pembuatan saluran drainase diperlukan untuk menampung aliran air sisa, saluran drainase mikro dibuat didalam tapak proyek yang kemudian pada akhirnya bermuara ke saluran drainase mikro yang berada diluar proyek. Pihak pemrakarsa proyek Thamrin Nine telah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengoperasian sumur *dewatering*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat izin pengoperasian sumur *dewatering* yang dikeluarkan oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan langsung dilapangan dan membandingkan hasil perhitungan debit air dengan perhitungan daya tampung.

Untuk meminimalisir adanya penurunan terhadap kualitas air permukaan dilakukan dengan mengelola limbah cair dari MCK ke *septic portable*, membuat *silt trap* di area bedeng, dan mengoperasikan *water recycle system*. Limbah MCK ditampung di dalam *septic portable* kemudian disalurkan ke sampit guna dilakukan penyaringan. Jumlah *septic portable* dapat dihitung dari kebutuhan air/orang/hari, jumlah pekerja yang ada, serta kapasitas *septic portable* yang akan digunakan. Pemrakarsa dan kontraktor telah membuat *silt trap* yang digunakan untuk melakukan penyaringan pada toilet pekerja sebelum air buangan tersebut bersatu dengan air buangan warga agar air buangan pekerja yang lebih kotor tidak menghambat saluran

warga. Water Recycle System yang dilakukan yaitu berasal dari air limbah domestik. Air limbah domestik terdiri dari dua jenis yaitu black water (limbah dari septictank) dan grey water (limbah dari a menir bekas cuci, dapur, dsb). Air yang dikumpulkan untuk disaring adalah air limbah domestik yang berupa grey water, baru kemudian dialirkan untuk digunakan dalam proses konstruksi. Selain itu, air tersebut juga digunakan untuk masyarakat sebagai air kualitas kelas dua yang dapat digunakan kembali seperti untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan, dan menyiram jalan dan begitu seterusnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Sedangkan bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan langsung dengan melakukan pengambilan sampel dan melakukan analisa di laboratorium.

Bentuk pengelolaan untuk mengurangi penurunan terhadap kuantitas air permukaan adalah dengan melakukan Melakukan recharging air *dewatering* ke dalam tanah, Mengoptimalkan penggunaan Water Recycling System (WRS), dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai izin pengambilan air tanah pada kegiatan *dewatering*. Air tanah yang keluar akibat pekerjaan pembuatan basement dimasukkan kembali ke dalam tanah dengan jumlah yang telah ditentukan. Hasil wawancara dengan HSE menunjukkan bahwa sumur recharge dipasang 15 meter dari permukaan yang ada. Penggunaan Water Recycling System pada Thamrin Nine dirasa sudah optimal karena air hasil penyaringan sangat melimpah sehingga kebutuhan air selama tahap konstruksi selalu terpenuhi dan kebutuhan air masyarakatpun tidak terganggu. Pemrakarsa proyek Thamrin Nine telah mengantongi izin dari pemerintah salah satunya mengenai izin pemanfaatan air tanah hasil kegiatan *dewatering*. Sedangkan bentuk pemantauan yang dilakukan adalah

dengan melakukan pemeriksaan langsung dilapangan dengan melakukan analisis data dan membandingkan hasilnya dengan pemantauan sumur berkala.

Untuk memaksimalkan adanya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan dengan Meningformasikan kepada masyarakat tentang adanya kesempatan kerja berikut kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan Menyediakan lapangan usaha di sekitar tapak proyek untuk mendukung operasional pekerja konstruksi yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Pemrakarsa mengupayakan agar seluruh masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek mengetahui bahwa proyek tersebut membutuhkan pekerja dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga warga sekitar proyek yang memenuhi kriteria dapat berpartisipasi. Namun menurut warga sekitar Pemrakarsa tidak menginformasikan secara besar-besaran, dan tercatat warga sekitar yang bekerja di proyek itu yaitu hanya untuk sebagai pekerja. Adanya proyek ini juga membuka banyak usaha baru di sekitar tapak proyek. Namun warga yang membuka usaha di sekitar proyek mengaku bahwa usaha mereka tidak di koordinir oleh pihak Pemrakarsa, artinya Pemrakarsa tidak menyediakan lapangan usaha bagi warga sekitar. Sedangkan bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi lapangan dengan dengan data penerimaan pekerja dan kesempatan berusaha kemudian membandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja dan usaha yang mungkin dapat dilakukan oleh warga sekitar. Namun, bentuk pemantauan dalam dokumen tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa maupun kontraktor.

KESIMPULAN

Analisis pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL Proyek Thamrin Nine

sebagian besar telah dilaksanakan, tetapi ada beberapa pengelolaan yang tidak dilaksanakan baik itu karena tidak diperlukan lagi maupun memang tidak dilaksanakan sejak awal kegiatan berlangsung. Analisis kesesuaian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara umum sudah dapat dikatakan sesuai dengan dokumen RKL, tetapi ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan dokumen tersebut.

Keterbatasan analisa ini yaitu kurang mampu memberikan solusi atas belum sesuainya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan dokumennya sehingga diharapkan untuk ke depan dapat lebih mencari tahu agar didapatkan solusi yang tepat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bapak Budi Damianto sebagai Dosen Pembimbing Proyek Akhir yang telah membimbing dalam menyusun Proyek Akhir ini.

Ibu Rina Suryani selaku Ka Subid AMDAL yang telah memberikan data data AMDAL.

Ibu Sartika selaku HSE Manager yang telah memberi izin untuk meninjau proyek Thamrin Nine.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cahyo, F.K.D., & Hapsari, Ayu Niken. 2018. TINJAUAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL PROYEK FN TOWER TAHAP KONSTRUKSI. Depok, Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Teknik Sipil.
- [2] Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga. 2009. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No.011/BM/2009, 7-9.
- [3] Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2017.

- Data Pekerjaan Kelurahan DKI Jakarta. www.data.jakarta.go.id. (diakses 22 Juni 2019).
- [4] Fauziah, E.N., & Lindawati. 2016. Studi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tahap Konstruksi Proyek Menara Pertiwi. Depok, Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Teknik Sipil.
- [5] (2001). Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 Tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.
- [6] (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- [7] (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Jakarta.
- [8] Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Jakarta.
- [9] (2012). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jakarta.
- [10] Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta.
- [11] Rosalina, A., & Mawadah, S. 2015. Studi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tahap Konstruksi Proyek Atlanta Residences Kota Depok. Depok. Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Teknik Sipil.